



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI X DPR RI
MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 24 S.D. 28 OKTOBER 2022**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI fokus pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan. Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 22 Agustus 2022, Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke 3 (tiga) daerah yaitu ke Provinsi Lampung, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

A. Dasar Hukum

- a. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
- b. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI; Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan; Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI;
- d. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023;
- e. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 22 Agustus 2022 tentang Rencana Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Lampung, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Tujuan

Kunjungan kerja ini ditujukan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Pejabat Daerah mengenai implementasi undang-undang dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di daerah yang dikunjungi.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 oleh Komisi X DPR RI ke Provinsi Lampung dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. disertai anggota Komisi X DPR RI dari berbagai unsur fraksi, dan juga didampingi oleh Sekretariat Komisi X DPR RI, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Bagian TV Parlemen, serta Bagian Media Cetak dan Media Sosial DPR RI.

Tim juga didampingi oleh Pejabat dari Mitra Kerja Komisi X DPR RI, yaitu:

1. Temu Ismail, S.Pd., M.Si, Direktur Pendidikan Profesi Guru, Kemendikbudristek RI.
2. Dra. Oneng Setya Harini, M.M., Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, dan Dwi Marhen Yono, S.STP., M.Si., Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kemenparekraf RI.
3. Dr. Samsudin, M.Pd., Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Drs. Agus Sutoyo, M.Si., Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Perpustakaan RI.

D. Jadwal Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Lampung, Ir. Arinal Djunaidi.
 - a. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni.
 - b. Kapolda Provinsi Lampung.
 - c. Kajakti Provinsi Lampung.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 - e. Ketua Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan dan PGRI Lampung.
 - f. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
 - g. PHRI, ASITA, PUTERI, dan instansi terkait yang menangani kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung.
 - h. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 - i. KONIDA, KNPI, organisasi kepemudaan, dan Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung.
 - j. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Lampung.
 - k. Perguruan Tinggi:
 - 1) LLDIKTI Wilayah II.
 - 2) Rektor Universitas Lampung.
 - 3) Rektor Institut Teknologi Sumatera.
 - 4) Direktur Politeknik Negeri Lampung.
 - 5) Rektor Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung
 - 6) Rektor Universitas Malahayati, Bandar Lampung
 - 7) Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung.

II. TEMUAN DATA

Berikut data tertulis yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi X DPR RI:

A. BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

1) Guru dan Tenaga Kependidikan

Pada Tahun 2020 telah diangkat sebanyak 80 orang guru PPPK dari seleksi Guru K-2 pada tahun 2019. Pada tahun 2021 telah diangkat sebanyak 255 orang guru PPPK, SK pengangkatan telah diterbitkan seluruhnya oleh BKD Provinsi Lampung dan pembayaran gajinya telah terbayarkan terhitung sejak bulan Mei 2022. Dari hasil seleksi PPPK tahun 2021, terdapat 1.429 yang telah lulus *Passing Grade* tetapi belum mendapatkan formasi. Pada tahun 2022 ini Provinsi Lampung sesuai dengan kemampuan daerah, membuka sebanyak 422 formasi yang diambil dari peserta seleksi PPPK Tahun 2021 yang telah lulus *Passing Grade* yang telah diurutkan berdasarkan *ranking* oleh Kemendikbudristek RI.

2) Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum penyaluran BOS jenjang SMA/SMK/SLB dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung berjalan baik sesuai dengan petunjuk teknis yaitu Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022. Untuk Provinsi Lampung Anggaran BOS SMA/SMK/SLB Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 503.108.940.000,-, terdiri dari :

- a. SMA Negeri Rp 191428850000,-
- b. SMK Negeri Rp 113.930.480.000,-
- c. SLB Negeri Rp 5.132.380.000,-
- d. Hibah SMA/SMK/SLB Swasta Rp 192.689.730.000,-

3) Kurikulum Pendidikan Menengah

Untuk Pelaksanaan Kurikulum Dikdikbud telah melakukan pendataan bagi Satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kategori	SMA		Kurikulum
		Negeri	Swasta	
1	Mandiri Belajar	22	6	Kurikulum-13
2	Mandiri Berbagi	2	5	IKM
3	Mandiri Berubah	55	36	IKM
Jumlah		79	47	

4) Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan Merdeka Belajar dari awal pelaksanaan sampai saat ini, Pemprov Lampung sangat apresiasi dalam melaksanakan MoU bersama Kemendikbudristek dan telah melakukan perjajian kerja sama dengan 35 Satuan Pendidikan jenjang SMA Pelaksana Sekolah Penggerak, dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/354/V.01/HK/2022, serta memberikan dana sharing sebesar Rp. 60.000.000,- kepada satuan pendidikan pelaksana sekolah penggerak/Guru Penggerak dalam Kurikulum Merdeka Belajar. Sedangkan untuk Organisasi Penggerak dibantu melalui Bantuan Komunitas Belajar MGMP untuk dapat bergabung dalam *platform* merdeka belajar dalam komunitas belajar Kemendikbudristek dengan dana bantuan Rp.35.000.000,- untuk 30 Komunitas Belajar.

5) Pendidikan Khusus

- a) Pelaksanaan Kebijakan telah ditindaklanjuti melalui kegiatan Bimtek Tenaga Pendidik SLB se-Provinsi Lampung untuk memahami secara penuh mengenai Merdeka Belajar dengan melibatkan Tenaga Ahli Profesional, Sekolah Penggerak SLB, Guru Penggerak yang ada di Provinsi Lampung sebagai wadah koordinasi untuk semua SLB di Provinsi Lampung untuk peningkatan kualitas pendidikan khusus serta memacu sekolah dan guru-guru lainnya menjadi Sekolah dan Guru penggerak.
- b) Pada SLB di Provinsi Lampung pada Tahun 2022 telah diangkat tenaga guru yang berstatus honorer menjadi P3K melalui tes pada tahun 2021 sejumlah 20 orang dan telah ditempatkan pada SLB Negeri di Provinsi Lampung, sedangkan penerimaan CPNS guru melalui rekrutmen jalur umum pada SLB di Provinsi Lampung sampai saat ini belum tersedia formasinya.

- c) Kegiatan bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada tahun 2022, telah ditetapkan dan akan disalurkan kepada 157 siswa-siswi di SLB se-Provinsi Lampung yang penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diverifikasi oleh operator PIP pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus berkoordinasi dengan Pihak Kementerian.
- d) Pembelajaran Tatap Muka pada SLB se-Provinsi Lampung sampai saat ini telah dilaksanakan 100%. Siswa-siswi dan Tenaga Pendidik pada SLB se-Provinsi Lampung telah diberikan vaksin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

6) Sekolah Penggerak.

Telah berlangsung 3 kali angkatan untuk program sekolah penggerak jenjang SMA maupun SLB. Pada angkatan I, terdapat 15 SMA dan 1 SLB yang berasal dari Kabupaten Lampung tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro. Pada angkatan II terdapat 20 SMA dan 1 SLB yang berasal dari Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan, Kota Metro dan Kabupaten Mesuji. Angkatan III terdapat 4 SMA dan 4 SLB yang berasal dari Way kanan, Bandar Lampung, Lampung Timur, Tulangbawang Barat, dan Lampung Selatan. *(Data selengkapnya dapat dilihat di Jawaban Tertulis).*

7) Program Guru Penggerak

Data Kelulusan Program Pendidikan Guru Penggerak Jenjang Dikmen di Provinsi Lampung, sebagai berikut:

No.	Kabupaten	SMA/ SMK	KETERANGAN
1	Tanggamus	9	Angkatan 1
2	Tulang Bawang Barat	7	Angkatan 1
3	Bandar Lampung	21	Angkatan 2
4	Lampung Tengah	7	Angkatan 2
5	Lampung Timur	6	Angkatan 2
6	Pesawaran	1	Angkatan 2
7	Lampung Utara	15	Angkatan 3
8	Lampung Selatan	13	Angkatan 3
JUMLAH LULUS		79	

Data Program Pendidikan Guru Penggerak di Provinsi Lampung yang sedang berjalan dan Sasaran Program Guru Penggerak di Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022:

No.	Kabupaten	Angkatan	SMA/ SMK	Keterangan
1	Tanggamus	4	2	Lokakarya 7
2	Pringsewu	4	11	Lokakarya 7
3	Bandar Lampung	5	25	Lokakarya 2
4	Lampung Tengah	5	25	Lokakarya 2
5	Lampung Barat	5	1	Lokakarya 2
6	Tulang Bawang	5	7	Lokakarya 2
7	Metro	5	8	Lokakarya 2
8	Lampung Timur	6	52	Lokakarya O
9	Pesawaran	6	19	Lokakarya O
10	Lampung Utara	6	26	Lokakarya O
11	Lampung Selatan	6	27	Lokakarya O
12	Lampung Barat	7	5	Persiapan Pelaksanaan

13	Lampung Tengah	7	36	Persiapan Pelaksanaan
14	Lampung Timur	7	1	Persiapan Pelaksanaan
15	Pringsewu	7	16	Persiapan Pelaksanaan
16	Tanggamus	7	20	Persiapan Pelaksanaan
17	Tulang Bawang	7	8	Persiapan Pelaksanaan
18	Tulang Bawang Barat	7	5	Persiapan Pelaksanaan
19	Way Kanan	7	7	Persiapan Pelaksanaan
20	Bandar Lampung	7	38	Persiapan Pelaksanaan
21	Lampung Utara	7	6	Persiapan Pelaksanaan

8) Organisasi Penggerak

Untuk Program Organisasi Penggerak di Provinsi Lampung ada 3 Organisasi Penggerak yaitu:

- a) SPEAK Indonesia di Bandar Lampung, sasaran jenjang PAUD di Kecamatan Panjang. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
- b) FGII, sasaran jenjang SD di Kabupaten Lampung Selatan. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
- c) KerLiP, sasaran jenjang SMP di Kabupaten Pesisir Barat. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.
- d) Program Organisasi Penggerak hanya dilaksanakan pada pada Jenjang Pendidikan Dasar saja, sedangkan untuk jenjang Pendidikan Menengah tidak ada.

B. BIDANG KEBUDAYAAN

Program dan upaya Pemerintah Daerah dalam memajukan kebudayaan terutama permasalahan pasca-pandemi Covid-19:

- 1) Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, baik yang tradisional maupun yang terbaru.
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dalam bentuk Workshop Seni, Seminar Seni, Pergelaran dan Pameran Seni.
- 3) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk Eksperimentasi Seni/Pergelaran Seni.
- 4) Menyelenggarakan pengolahan, penggalian dan pemeliharaan seni
- 5) Menyelenggarakan publikasi dan dokumentasi.
- 6) Pemeliharaan peralatan dan gedung.

C. BIDANG PENDIDIKAN TINGGI

1) Politeknik Negeri Lampung

- Pendidikan di era Covid-19, secara umum dapat diatasi dengan *online system* (LMS + Zoom). Pasca pandemi dilakukan *online* untuk teori (30%) dan *full luring* untuk praktek (70%). Karena Polinela 70% kegiatan praktek maka dilakukan luring. Kendala mahasiswa tidak punya pulsa, solusinya mahasiswa menggunakan WiFi kampus.
- Sebagai pendidikan vokasi/keterampilan kekurangan utama Polinela adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan praktek untuk mahasiswa. Di samping kuantitas kurang, peralatannya ketinggalan teknologi. Mahasiswa Polinela 3000 orang merupakan mahasiswa bidang Pertanian, idealnya 3.000 mahasiswa bidang pertanian memiliki

lahan praktek seluas 3.000 x 1.000 m² atau 300 Ha. Saat ini lahan prakteknya hanya 20 Ha.

- Polinela juga sangat kekurangan gedung kuliah dan praktikum, solusinya kuliah dan praktikum dilaksanakan di saung meeting.
- KIP Kuliah sangat kurang, mahasiswa Polinela mayoritas berasal dari daerah pedesaan dan kurang mampu secara ekonomi, pilihannya kalau tidak ada KIP Kuliah maka tidak kuliah. Pada program studi D4/S1 terapan umumnya secara ekonomi lebih mampu, tapi untuk mahasiswa D3 apalagi D2 tidak ada KIP Kuliah, tidak kuliah.
- Bagi pendidikan tinggi vokasi seperti Polinela model pembelajaran Project Based Learning (PBL), Link and Match dengan DUDI terkait MBKM sudah lama dilaksanakan sejak berdiri, sehingga tingkat keterserapan lulusan dan berwirausaha sangat tinggi.

2) Universitas Malahayati:

- Pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi di era pandemi dilaksanakan secara online/daring dan asrama mahasiswa ditiadakan, sejak TA 2022-2023 perkuliahan dilaksanakan tatap muka secara penuh.
- Pendapatan Perguruan Tinggi sangat menurun drastis akibat dari menurunnya mahasiswa baru dan banyaknya permohonan penundaan pembayaran SPP oleh mahasiswa dikarenakan terdampak pandemi.
- Solusinya adalah mengajukan bantuan UKT SPP dari pemerintah dan KIP kuliah, meskipun besarnya juga belum dapat memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan.
- Terkait tenaga Dosen dan Kependidikan, terkendala pembayaran gaji dan honor karena keterbatasan pemasukan perguruan tinggi yang lambat laun pasca pandemi mulai normal.
- Terkait urgensi kebijakan MBKM kurang tepat dan belum urgen karena tidak dilakukan dengan kesiapan yang matang terhadap perangkat di Kemendikbud dan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi swasta, sehingga banyak terjadi ketidaksamaan persepsi, baik di pihak perangkat Kemendikbudristek dengan Perguruan Tinggi, yang seharusnya sebelum penetapan MBKM dilakukan persiapan yang baik terhadap seluruh perangkat di Kemendikbudristek dan perguruan tinggi.
- Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disusun oleh Kemendikbudristek RI memang sulit dilaksanakan pada masa pandemi, dikarenakan keterbatasan dalam perubahan kurikulum.
- Penyesuaian kurikulum pembelajaran dan kerjasama dengan mitra dunia usaha dan dunia industri (BUDI) bisa dilaksanakan oleh perguruan tinggi, tetapi yang menjadi kendala adalah dunia usaha dan dunia industri belum banyak memahami pentingnya melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi khususnya swasta.

3) Universitas Muhammadiyah Lampung

- Pelaksanaan sistem pembelajaran pada satuan di Universitas Muhammadiyah Lampung mengalami perubahan bentuk operasional yang digeneralisasi melalui kebijakan pembelajaran dan mengikut pada kebijakan sosial, yaitu instruksi *social distancing* hingga berujung pada himbauan *lockdown*.

- Program-program yang sudah dijalankan selama ini sudah berjalan dengan baik namun demikian tantangan juga banyak. Dalam hal penelitian, Universitas Muhammadiyah Lampung untuk hibah internal, belum dapat maksimal dikarenakan pembiayaan yang belum maksimal.
- Dosen secara bertahap terus ditingkatkan kompetensinya mulai dari jenjang pendidikan pada saat ini. Universitas Muhammadiyah Lampung telah menyekolahkan beberapa orang dosen untuk jenjang Doktor dengan bantuan biaya dari kampus. Untuk kenaikan pangkat dosen juga terus ditingkatkan dari AA ke Lektor hingga guru besar.
- Melalui kurikulum MBKM, Universitas Muhammadiyah Lampung berharap dapat terwujud iklim belajar yang kondusif dan memperioritaskan setiap individu mahasiswa dengan segala keunikannya masing-masing tanpa bermaksud menyeragamkannya. Kebijakan ini bagus tapi tidak seluruh Perguruan Tinggi mengerti rambu-rambu MBKM itu sendiri. Pelaksanaan MBKM ada beberapa masalah, misalnya mahasiswa keluar dari profil lulusannya, mungkin diperlukan suatu mekanisme tertentu sehingga ada profil lulusan pada masing-masing prodi.
- Contoh implementasi MBKM, yakni telah dilaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dimana Universitas Muhammadiyah Lampung mengirimkan 11 orang mahasiswa untuk belajar di kampus lain. Program Kampus mengajar juga sudah diimplementasikan oleh dosen-dosen yang ditugaskan.
- Universitas Muhammadiyah Lampung pada saat ini sudah memulai kurikulum OBE MBKM. OBE ini mencerminkan MBKM, dimana kurikulum pembelajarannya berorientasi pada luaran yang sudah terimplementasi dengan kegiatan MBKM. Akan dirumuskan pula *Center of Excellent* yang akan menjadi unggulan di setiap prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Lampung. Contohnya program pemerintah sekarang, yaitu praktisi mengajar yang dapat diimplementasikan tetapi harus bersaing di Universitas Muhammadiyah Lampung khususnya.

4) Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

- Untuk kelancaran kuliah daring mahasiswa, ITERA memberikan bantuan subsidi kuota internet bagi mahasiswa sesuai Surat Edaran Rektor Nomor: T/1360/IT9.A/HK.11/2020. Bantuan ditetapkan sebesar Rp.75.000 per bulan/mahasiswa selama bulan April-Mei 2020, sehingga total bantuan permahasiswa sebesar Rp.150.000. Jika diakumulasikan total bantuan untuk 8.421 mahasiswa aktif ITERA mencapai Rp.1,2 miliar.
- Sebagai perguruan tinggi negeri berbasis sains dan teknologi, salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan perkuliahan di ITERA adalah kegiatan praktikum mahasiswa. Meski demikian, masih terdapat kendala lainnya bagi program studi yang berbasis praktikum dan studio memerlukan penyesuaian. Tentunya penyesuaian ini mengakibatkan penurunan kualitas. Kegiatan pratikum dan tugas akhir, agak sulit dilakukan secara daring, karena itu *Learning Outcome* juga mengalami penurunan kualitas.

- Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ITERA senantiasa mendorong para dosen untuk aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga kehadiran ITERA dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat meski di era pandemi Covid-19. Untuk mendukung program tersebut, tahun ini ITERA mengucurkan anggaran mencapai Rp 3,5 miliar khusus untuk mendukung para dosen menghasilkan riset dan produk karya ilmiah berkualitas berupa publikasi, prosiding, hingga buku.
- Berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Institut Teknologi Sumatera juga berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program tersebut. ITERA telah menjalankan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Senat Akademik Nomor 1 tahun 2020, tentang Norma Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di ITERA.
- Dalam pengimplementasian program MBKM, ITERA juga menerima Program Bantuan Program Studi Menjadi Center of Excellence (COE) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2021 yaitu Program Studi Teknik Elektro dan Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek yaitu Program Studi Teknik Sipil dan Teknik Informatika.

5) LLDIKTI Wilayah II Lampung

- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II meliputi empat Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung. Berikut keadaan PT di LLDIKTI Wilayah II:
 - Keadaan Tahun 2019, Jumlah Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 208 Perguruan Tinggi Swasta dan 807 Program Studi. Jumlah Dosen pada Tahun 2019, sebanyak 599 dosen PNS, 7349 Dosen Tetap Yayasan.
 - Keadaan Tahun 2020, Jumlah Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 206 Perguruan Tinggi Swasta dan 853 Program Studi. Jumlah Dosen pada Tahun 2020, sebanyak 581 dosen PNS, 7850 Dosen Tetap Yayasan.
 - Keadaan Tahun 2021, Jumlah Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 199 Perguruan Tinggi Swasta dan 863 Program Studi. Jumlah Dosen pada Tahun 2021, sebanyak 553 dosen PNS, 7947 Dosen Tetap Yayasan.
- Data tersebut, terjadi pengurangan Jumlah Perguruan Tinggi dikarenakan ada Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah II yang diselenggarakan oleh satu Yayasan, diusulkan untuk melakukan penggabungan/penyatuan, atau perguruan tinggi yang memiliki visi dan misi yang sama, diusulkan melakukan penggabungan/penyatuan.

D. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 1) Upaya mendukung pencapaian target-target dimaksud tertuang dalam rencana pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang merupakan sektor jasa. Pengembangan destinasi pariwisata,

pengembangan kelembagaan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengembangan pemasaran pariwisata menjadi fokus dalam dukungan terhadap target pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif nasional. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki perencanaan lima tahun yang berorientasi kepada terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif yang maju dan berdaya-saing. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus mampu menjadi sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap PDRB dan perekonomian lampung secara umum.

- 2) Mewujudkan Lampung sebagai Provinsi yang kaya festival, mengembangkan agrowisata dan ekowisata, serta berkoordinasi intens dengan Perangkat Daerah terkait, dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur menuju destinasi prioritas dan Bandar Udara Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat sebagai kantong wisatawan mancanegara.
- 3) Masukan dan usulan terhadap substansi undang-undang yang perlu direvisi: (1) Tata kelola destinasi pariwisata yang komprehensif, lintas-sektor, dan berkelanjutan; (2) Unsur 3 A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) dalam pengembangan destinasi wisata; dan (4) *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan yang merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat serta mengurangi dampak negatif dari pembangunan pariwisata.

E. BIDANG KEPEMUDAAN

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pemberdayaan Pemuda	1) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 2) Kegiatan Workshop Pembinaan Pramuka 3) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi Kemahasiswaan 4) Pelatihan Kepemimpinan Pelajar Tingkat Dasar 5) Jambore Pemuda Indonesia
2	Program Pengembangan Pemuda	6) Pembinaan Pemuda Pelopor 7) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 8) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Daerah
3	Program Penyadaran Pemuda	9) Workshop Pemuda KAdar Anti-Radikalisme 10) Pelantikan Pengurus Kader Inti Pemuda Anti-Narkoba 11) Pelatihan Penyuluh Anti-Narkoba

Data lengkap: lihat di Jawaban Tertulis Pemprov Lampung.

F. BIDANG KEOLAHRAGAAN

- 1) Harapan Pemprov Lampung terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 13 ayat 2, terkait wewenang Pemda dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), prioritas pembinaan 14 Cabor DBON di daerah yaitu: bulutangkis, angkat besi, panahan, panjat tebing, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, senam artistik, pencaksilat. Karena keterbatasan APBD, diharapkan ada dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat untuk membangun fasilitas 14 Cabor DBON dan pelatihan pelatih yang berkesinambungan pada 14 Cabor DBON,
- 2) Pemprov Lampung berencana membangun sport center atau pusat olahraga berstandar internasional dan sudah disiapkan lahan seluas 150

hektar. Sebelumnya aktivitas dilakukan di Gelanggang Olahraga Saburai, namun nantinya akan dipindahkan ke kawasan olahraga sport center, bila telah dibangun. Sport Center juga akan difokuskan pada bidding PON 2024/2028.

G. BIDANG PERPUSTAKAAN

Perkembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Provinsi Lampung sudah berjalan sejak Tahun 2017-2022. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Lampung, terutama untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan Kesejahteraan masyarakat.
- b. Penerima Manfaat Program Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terdiri dari 14 Kabupaten /Kota. Dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. 1 (satu) kabupaten Kota tidak dapat menerima Program tesebut, dikarenakan tidak adanya kelembagaan Perpustakaan pada Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Dari 14 Kabupaten/Kota yang sudah menerima Program TPBIS di Provinsi Lampung terdapat 58 Desa yang sudah menjadi penerima manfaat Program TPBIS yaitu:
 - Kabupaten Lampung Timur (Tahun 2017/2018) : 11 Desa
 - Kabupaten Lampung Selatan (Tahun 2017/2018): 9 Desa
 - Kabupaten Tulangbawang (Tahun 2019) : 4 Desa
 - Kabupaten Lampung Tengah (Tahun 2019) : 6 Desa/Kampung.
 - Kabupaten Way Kanan (Tahun 2019) : 6 Desa/Kampung
 - Kabupaten Pringsewu (Tahun 2020) : 4 Desa/Pekon
 - Kabupaten Tanggamus (Tahun 2020/2022) : 7 Desa/Pekom
 - Kabupaten Mesuji (Tahun 2021) : 6 Desa
 - Kabupaten Lampung Barat (Tahun 2021) : 4 Desa/Pekon
 - Kabupaten Lampung Utara (Tahun 2022) : -
 - Kabupaten Tulangbawang Barat (Tahun 2022) : -
 - Kabupaten Pesawaran (Tahun 2022) : -
 - Kota Bandar Lampung (Tahun 2022) : -
 - Kota Metro (Tahun 2022) : -
- d. Provinsi Lampung memiliki 3 (Tiga) Orang Master Trainer yang sudah Lolos Seleksi.
- e. Kegiatan Bimtek, Sosialisasi dan Replikasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terus berjalan, didukung dengan Biaya dari Anggaran APBD Provinsi.

III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Berikut ringkasan diskusi dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Lampung. Beberapa masukan yang disampaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Beberapa hal penting yang disampaikan Gubernur Provinsi Lampung, **Ir. Arinal Djunaidi**, dalam sambutannya antara lain:
 - a) Provinsi Lampung adalah penghasil beras nomor 5 di Indonesia. Produksi pangan sekitar 7 Juta Ton, dan pada saat pandemi masih memproduksinya, sehingga sekitar 1,3-1,8 Juta Ton didistribusikan ke luar provinsi. Provinsi Lampung memiliki program unggulan yang dapat menghubungkan semua

kepentingan pertanian, secara bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Program Kartu Petani Berjaya (KPB). Selama Covid-19, Lampung tetap mengalami pertumbuhan ekonomi, bahkan tertinggi di Indonesia.

- b) Di bidang pendidikan: telah dilakukan sensus PIP, program layanan pendidikan, dan vaksinasi pelaku pendidikan. Dalam layanan pendidikan, diantaranya telah dilakukan seleksi guru honorer menjadi P3K dengan mengacu pada *passing grade* berdasarkan *rangking* dari Kemendikbudristek RI. Program Merdeka Belajar telah dilaksanakan, dan kami mengapresiasi pelaksanaan program ini.
 - c) Di bidang pariwisata, Pemprov Lampung telah memiliki rencana untuk 5 tahun kedepan. Wisata yang dikembangkan antara lain destinasi wisata Pahawang, agrowisata, dan lain-lain, serta pariwisata untuk mendukung pengembangan Rumah Sakit Internasional. Bukan hanya di Singapura atau Malaysia, pendirian Rumah Sakit Internasional ini, adalah juga untuk mendukung pariwisata. Salah satu kendala pengembangan pariwisata di Lampung, adalah akses ke lokasi destinasi wisata yang terkendala oleh infrastruktur.
 - d) Lampung adalah penghasil atlet internasional, terutama angkat besi dan angkat berat. Banyak provinsi yang mengambil atlet angkat besi dari Lampung atau belajar ke Lampung. Pembinaan mereka dilakukan di Lampung, namun sampai saat ini masih terkendala oleh Sarana dan Prasarana latihan. Saat ini Lampung sedang membangun *Sport Center* seluas 15 Ha, dan letaknya cukup strategis di dekat jalan tol. GOR Indor bisa digunakan untuk juga untuk kegiatan selain olahraga, misalnya konser musik. *Sport Center* ini untuk perisapan menuju Lampung sebagai bakal calon tuan rumah PON 2024 atau 2028.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, **Sulpakar**, menyampaikan beberapa masukan diantaranya:
- a) Selain masih terdapat beberapa masalah guru dan tenaga kependidikan, Provinsi Lampung sangat kesulitan untuk meningkatkan jumlah guru produktif sehingga mengusulkan adanya kebijakan untuk mempercepat terpenuhinya guru produktif. Saat ini 90% guru di Lampung adalah honorer dan 10% ASN. Jumlah guru ASN ini pun sebagian akan memasuki pensiun. Contoh di SMA 10, dari 87 guru (44 honorer dan 43 ASN), 8 guru ASN diantaranya akan memasuki pensiun. Ketergantungan kepada guru honorer akan makin besar.
 - b) Dana BOS sebagian besar untuk memenuhi gaji guru honorer. Masyarakat ada yang memberikan dana sumbangan karena dana BOS yang tidak cukup untuk memenuhi kegiatan operasional. Namun, dana masyarakat yang sukarela ini, justru dinilai/dipertanyakan oleh sebagian masyarakat lainnya (yang tidak menyumbang). Kasus ini muncul di SMK 2, yang membutuhkan dana untuk pendidikan vokasi, namun sumbangan masyarakat/orangtua murid yang bersifat sukarela, justru dipertanyakan oleh sebagian orangtua murid lainnya sehingga menyurutkan tambahan dana pendidikan dari masyarakat yang sebenarnya signifikan.
 - c) Untuk meningkatkan kualitas guru, guru perlu “dimagangkan”. Ada program guru mengabdikan: mengajar di dalam kelas dan mengajar di luar kelas. Mengajar di luar kelas sesuai dengan upaya peningkatan karakter anak bangsa. Dengan adanya magang ini, maka program kepala sekolah

mengabdikan dapat dijalankan. Mereka dapat menjadi kepala sekolah di daerah terpencil. Program magang ini swadaya, bahkan para guru harus berbagi kamar menginap, untuk bisa ikut serta. Oleh karena itu anggaran dana BOS untuk kegiatan ini sangat diperlukan.

- d) Untuk memenuhi guru yang dapat menjadi kepala sekolah, diusulkan agar guru yang telah P3K dapat menjadi kepala sekolah. Dalam arti, peran dan fungsi guru P3K diperluas, karena untuk memenuhi syarat menjadi kepala sekolah harus ASN, sedangkan ASN jumlahnya tidak memenuhi. Ada sekolah yang seluruh gurunya adalah honorer.
3. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, menyampaikan antara lain, bahwa Lampung memiliki wisata pantai (1.200 km) dan *geopark* yang kaya. Dari atraksi, *amenity* dan *assesibility*, kendala Lampung adalah *amenity* dan *assesibility*. Artinya banyak destinasi yang masih terkendala akses (darat maupun laut). Dinas pariwisata tidak bisa sendirian mengatasi masalah akses ini, sehingga dibutuhkan peran dinas dan K/L lainnya untuk mempercepat akses wisata.
 4. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, menyampaikan antara lain sebagai berikut:
 - a) Beberapa kegiatan kepemudaan telah dilaksanakan, seperti Program Pemberdayaan Pemuda, Program Pengembangan Pemuda, dan Program Penyadaran Pemuda, sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban tertulis. Yang dibutuhkan adalah suport dana, karena kegiatan kepemudaan ini tidak terlalu seksi misalnya dibanding kegiatan infrastruktur, dll.
 - b) Pelaksanaan pembangunan *Sport Center* tetap harus dikawal, agar pelaksanaannya sesuai dengan RAB dan dapat berlangsung dengan baik. Perlu ada sinergi dari beberapa badan/lembaga sehingga pelaksanaan pembangunan *Sport Center* lebih koordinatif.
 - c) Pelaksanaan UU Keolahragaan butuh aturan pelaksanaan turunannya, sehingga segera dapat dilaksanakan. Karena keterbatasan APBD, Provinsi Lampung masih butuh tambahan dana agar dalam pelaksanaan DBON untuk 14 Cabor, dapat dilaksanakan dengan baik.
 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyampaikan beberapa permasalahan hal diantaranya:
 - a) Kendala SDM pustakawan yang terbatas. Pada tahun 2021, ada penambahan 4 CPNS, namun belum cukup untuk memenuhi jumlah SDM perpustakaan.
 - b) Koleksi perpustakaan juga terbatas, terutama di perpustakaan-perpustakaan sekolah karena buku-buku di sekolah umumnya buku paket, bukan buku bacaan. Anggaran BOS tidak ada untuk perpustakaan.
 - c) Beberapa kabupaten tidak punya Gedung perpustakaan. Namun pada tahun ini ada pembangunan Gedung di Kabupaten Waykanan, Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Diharapkan tahun depan (2023) ada pembangunan di Kabupaten Pesawaran.
 6. Kepala LLDIKTI II Lampung menyampaikan beberapa masukan diantaranya sebagai berikut:
 - a) LLDIKTI II membawahi 4 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Bangka Belitung. Jumlah PTS terus menurun, karena ada penggabungan PTS yang kurang sehat. Tahun

- 2009 ada 208 PT, menurun menjadi 206 PT (tahun 2020) dan 199 PT (2021). Pada tahun 2022 ini hanya menjadi 188 PT.
- b) Selain itu, pemenuhan jumlah dosen juga menjadi permasalahan. Dari 8.580 dosen yang ada (dan terus meningkat jumlahnya), 60-70% nya, masih berpendidikan S2. Sehingga harus ditingkatkan menjadi S3 sesuai persyaratan menjadi dosen. Diusulkan, agar ada penambahan beasiswa bagi dosen agar jumlah terpenuhi. Pendidikan S3 mayoritas ada di pulau Jawa sehingga perguruan tinggi di Sumatera perlu didukung untuk menyelenggarakan pendidikan S3.
7. Insitut Teknologi Sumatera (ITERA) menyampaikan tanggapan, diantaranya telah membuka program studi pariwisata dan olahraga, namun belum ada pengesahannya sehingga dibutuhkan dukungan pengesahan dari Kemendikbud segera. Pembukaan dua Prodi ini untuk mendukung pariwisata dan olahraga Provinsi Lampung.
8. Direktur Politeknik Negeri Lampung, **Dr. Ir. Sarono, M.Si.**, diantaranya menyampaikan bahwa Politeknik Negeri Lampung menyelenggarakan D2 dan D3 dengan mahasiswa yang umumnya berasal dari keluarga kurang mampu (anak petani) sehingga dibutuhkan lebih banyak KIP. Ada keterbatasan pengembangan *teaching factory* dengan industri, sehingga dibutuhkan dorongan bagi industri untuk bekerjasama dengan Politeknik Negeri Lampung.
9. Pengurus PHRI Lampung menyampaikan antara lain bahwa pada saat pandemi, tingkat hunian hotel di Lampung masih tergolong baik. Untuk mendukung pengembangan wisata di Lampung, dibutuhkan dukungan infrastruktur, terutama perbaikan aksesibilitas menuju destinasi-destinasi wisata yang tengah berkembang.
10. **Temu Ismail, S.Pd., M.Si**, Direktur Pendidikan Profesi Guru, Kemendikbudristek RI, menyampaikan tanggapan, antara lain sebagai berikut:
- a) Hampir di semua provinsi terjadi kekurangan ASN guru, karena tidak kontinyu pertahun ada pengangkatan guru ASN. Per-tahun sekitar 70 ribu guru pensiun. Untuk mengejar itu, ada prioritas PPG Pra-Jabatan dari Kemendikbud yang disiapkan berdasarkan guru yang pensiun di tahun tahun ke depannya.
- b) Guru magang, guru mengabdikan, dan lain-lain, diharapkan menjadi komunitas guru sehingga kemampuan dan pengalaman yang dimiliki guru penggerak dapat diimbaskan melalui komunitas yang ada.
11. **Dra. Oneng Setya Harini, MM**, Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, dan **Dwi Marhen Yono, S.STP., M.Si**, Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kemenparekraf RI, menyampaikan tanggapan, antara lain sebagai berikut:
- a) Aksesibilitas memang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Kemenparekraf, tapi harus dengan K/L lainnya, sehingga butuh koordinasi yang kuat. Kemenpar hanya bisa mengorkestrasi pembangunan dengan K/L terkait, terutama masalah aksesibilitas, amenities (menangani sampah, dll).
- b) Target 700 juta pergerakan, diharapkan naik 3 kali lipat di tahun depan, sehingga dapat mengimbangi resesi. Ada 100 Paket Wisata di Indonesia, daerah dapat mengakurasi minimal 3 paket tersebut. Desa Kreatif Desa Wisata akan disiapkan 100 Desa Wisata, dari 7 ribuan desa yang siap.

Selain itu, daerah perlu memperbanyak even, misalnya Cabor dibikin even, sehingga *sport tourism* bisa mendukung pengembangan pariwisata.

12. **Dr. Samsudin, M.Pd.**, Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, menyampaikan tanggapan, antara lain bahwa pembangunan *Sport Center* Lampung akan dikawal dan disuport. Untuk *bidding* PON 2024 atau 2028, Lampung silahkan menggandeng provinsi terdekat (Banten atau Bengkulu). Sedangkan untuk pelaksanaan Undang-Undang Keolahragaan memang sedang disiapkan PP-nya.
13. **Drs. Agus Sutoyo, M.Si.** Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Perpustakaan RI, menyampaikan tanggapan bahwa Lampung di tahun 2022 ada DAK sekitar Rp11 Miliar. Sedangkan tahun 2023 nanti telah disiapkan Rp13 Miliar untuk beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Waykanan, Pesawaran, Mesuji, dan Tulangbawang Barat).
14. Komisi X DPR RI, antara lain melalui **Rano Karno, Iliza Saaduddin Jamal, Mohammad Kadafi, Agustina Wilujeng, dan Sodik Mudjahid**, menyampaikan tanggapan, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Mendorong para pemangku kepentingan di Provinsi Lampung untuk menyampaikan data tertulis, terkait permasalahan yang lebih mendesak, sehingga ada data pendukung bagi Komisi X DPR RI untuk menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah.
 - b) Provinsi Lampung perlu memiliki dan menginformasikan data investasi bidang pariwisata khususnya, agar keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Lampung lebih meningkat.
 - c) Komisi X DPR RI akan akan mengagendakan Kunjungan Kerja Bidang Pariwisata, khususnya mengunjungi Pantai Paseban Lampung.

IV. KESIMPULAN

- 1) **Bidang Pendidikan Dasar.** Pelaksanaan program kegiatan pendidikan dasar, secara umum berjalan baik dengan beberapa kendala umum yang berlangsung di lapangan. Beberapa masukan dan usulan, antara lain:
 - a) Terdapat potensi kekurangan guru (terutama guru ASN) dan kekosongan posisi jabatan Kepala Sekolah, karena sebagian besar akan memasuki masa pensiun dan aturan larangan guru P3K menjadi kepala sekolah. Diusulkan agar pengangkatan guru P3K dipercepat dan ada kebijakan perluasan kewenangan guru P3K, misalnya untuk Jabatan Kepala Sekolah.
 - b) Pemerintah perlu meningkatkan dana BOS, mengingat kondisi atau keadaan saat ini sangat dipengaruhi banyak hal, diantaranya kemahalan biaya, perlaksanaan dukungan pembelajaran, maupun untuk pemenuhan gaji guru (yang sebagian besar masih honorer).
- 2) **Bidang Pendidikan Tinggi,** terdapat beberapa perkembangan dan kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Jumlah PTS terus menurun, karena ada penggabungan PTS yang kurang sehat. Tahun 2009 ada 208 PT, menurun menjadi 206 PT (tahun 2020) dan 199 PT (2021). Pada tahun 2022 ini hanya menjadi 188 PT. Penurunan ini diupayakan untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi tersebut.
 - b) Terdapat permasalahan pada pemenuhan jumlah dosen. Dari 8.580 dosen yang ada di wilayah II (dan terus meningkat jumlahnya), 60-70%-

nya, masih berpendidikan S2. Sehingga harus ditingkatkan menjadi S3 sesuai persyaratan menjadi dosen. Diusulkan, agar ada penambahan beasiswa bagi dosen agar jumlah dosen terpenuhi, mengingat pendidikan S3 mayoritas ada di pulau Jawa. Diusulkan pula ada beasiswa untuk pendidikan tinggi yang ada di Sumatera bagi S3.

- c) Politeknik Negeri Lampung menyelenggarakan D2 dan D3 dengan mahasiswa yang umumnya berasal dari keluarga kurang mampu (anak petani), oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak KIP.

3) Bidang Pariwisata, menunjukkan bahwa Lampung memiliki destinasi wisata alam yang sangat potensial diantaranya wisata pantai.

- a) Provinsi Lampung tentang mengembangkan amenitas, aksesibilitas dan atraksi. Namun kendala utama yang dihadapi adalah aksesibilitas ke destinasi wisata maupun amenitas yang masih perlu diperbaiki dan diperbanyak. Kendala aksesibilitas ini tidak bisa diatasi sendiri oleh bidang pariwisata, namun membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan kementerian lainnya, terutama terkait bidang pekerjaan umum.
- b) Pembangunan RS Internasional telah dikembangkan oleh Pemprov Lampung sebagai bagian dari pariwisata internasional sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura.

4) Bidang Keolahragaan, pelaksanaan pembangunan *sport center* tetap harus dikawal, agar pelaksanaannya sesuai dengan RAB dan dapat berlangsung dengan baik. Perlu ada sinergi dari beberapa badan/lembaga sehingga pelaksanaan pembangunan *Sport Center* lebih koordinatif. Keberhasilan pembangunan *Sport Center* sangat penting bagi Provinsi Lampung untuk mengikuti *bidding* PON 2024 atau 2028.

5) Bidang Perpustakaan, terdapat kendala diantaranya: (1) kendala SDM pustakawan yang terbatas untuk memenuhi jumlah SDM Perpustakaan; (2) koleksi perpustakaan terbatas, terutama di perpustakaan-perpustakaan sekolah karena buku-buku di sekolah, umumnya buku paket yang disediakan melalui BOS, bukan buku bacaan; (3) beberapa kabupaten tidak punya gedung perpustakaan, namun tahun 2022 dan 2023 ini terdapat DAK untuk membangun progres perpustakaan di beberapa kabupaten/kota.

V. REKOMENDASI

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemedikbudristek RI, Pemprov Lampung untuk memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dan usulan bidang pendidikan (sebagaimana kesimpulan), antara lain:
 - a) perluasan peran dan fungsi guru P3K sehingga dapat memenuhi kebutuhan jumlah guru dan kepala sekolah, terutama di daerah terpencil.
 - b) menaikkan anggaran DAK pendidikan, untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pendidikan diluar gaji guru.
2. Di Bidang Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk memperhatikan usulan pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Provinsi Lampung, diantaranya:
 - a) meningkatkan beasiswa S3 untuk dosen-dosen di berbagai Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah II, khususnya Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung.

- b) meningkatkan kualitas dan jumlah penerima KIP bagi mahasiswa Politeknik Negeri Lampung.
 - c) segera mengesahkan Prodi baru yaitu Prodi Pariwisata dan Prodi Olahraga yang diusulkan oleh Institut Teknologi Sumatera (ITERA).
3. Di Bidang Parekraf, Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah, untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana jalan/transportasi bagi perbaikan aksesibilitas ke berbagai destinasi pariwisata yang berkembang di Provinsi Lampung termasuk pengembangan destinasi wisata untuk mendukung pengembangan RS Internasional.
 4. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung agar memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan *sport center* untuk *bidding* PON 2024 atau 2028.

VI. PENUTUP

Demikian laporan ini Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Lampung, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 1 November 2022

Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

TTD

Agustina W. Pramestuti, S.S., M.M.
A-185